

ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN MODEL SEKOLAH KESETARAAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**Asyraf Suryadin¹, Maulina Hendrik², Yuanita³, Dzihan Khilmi Ayu Firdaus⁴, Rusdi⁵,
Mardani⁶**

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, ^{5,6} Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

¹asyraf.suryadin@unmuhbabel.ac.id, ²maulina.hendrik@unmuhbabel.ac.id,

³yuanita@unmuhbabel.ac.id, ⁴dzihanayu@stkipmbb.ac.id ⁵rusdiplano95@gmail.com,

⁶dany01279@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengumpulkan informasi awal rancangan model sekolah kesetaraan sebelum mengembangkan model sekolah kesetaraan dengan tujuan khusus yang diselenggarakan oleh PKBM. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, teknik observasi, teknik angket, dan teknik dokumen. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data dan analisis secara naratif. Berdasarkan analisis data diketahui penyelenggaraan kesetaraan di PKBM terdiri atas Paket A, Paket B, dan Paket C. Sekolah kesetaraan dibutuhkan diantaranya: keterbutuhan status sosial, tingginya angka putus sekolah, fasilitas pendidikan khususnya jenjang pendidikan menengah pertama atau yang lebih tinggi belum tersedia secara merata, keinginan masyarakat untuk ikut dalam pemilihan perangkat desa, kurangnya motivasi, dan tingginya angka perkawinan anak. Berdasarkan telaah program sekolah kesetaraan di PKBM belum ditemukan inovasi baik pengelolaan maupun pelaksanaan pembelajaran, ketersediaan tutor yang sangat minim, latar belakang warga belajar mayoritas pekerja sehingga pengaturan waktu belajar belum optimal. Hasil yang diperoleh berdasarkan telaah, maka dikembangkan model sekolah pendidikan kesetaraan berbasis kewirausahaan yang dapat belajar kapan dan di mana saja; menjadikan pekerjaan warga belajar sebagai nilai, dan memberikan kursus bagi warga belajar putus sekolah yang belum bekerja melalui pola kerja sama.

Kata kunci: pengembangan, model sekolah kesetaraan, Bangka Belitung

Abstract

This study aims to gather preliminary information on the design of the high school equivalency model before formulating the particular determination on the high school equivalency model developed by Community Learning Center. The technique of collecting data used observation, interview, questionnaire, and documentation, and analyzed using descriptive qualitative. The results are showed that the implementation of school equivalency consists of learning program equivalent A, learning program equivalent B, and learning program equivalent C. The reasons why subjects took the School equivalency because 1) social status need, 2) schools' Dropout rates, 3) educational facilities, 4) organization apparatus needs, 5) low motivation, 6) child marriage. Based on the deep analysis, the school equivalency program is not optimal; there is neither innovation in the management learning process nor implementation in the teaching process; there is a lack of professional tutors; there is difficulty in arranging the time of study because of the learners' background. The findings propose the development of the high school equivalency model based on entrepreneurship. The model intends the learners to study everywhere and every time; creates the learners' profession as a value as well gives the learners courses based on the ability through the cooperative activities.

Keywords: Development, high school equivalency, Bangka Belitung

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran dalam menjaga kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan formal maupun non formal. Kehadiran pendidikan formal yang sudah berjalan belum dapat menjangkau ke semua elemen masyarakat yang memiliki permasalahan seperti putus sekolah karena pernikahan dini, putus sekolah karena biaya sehingga harus berkerja dan lain sebagainya. Salah satu penyediaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah institusi pendidikan non-formal dapat memainkan peran penting dalam menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang terlayani oleh sistem pendidikan formal. PKBM menawarkan berbagai program pembelajaran yang fleksibel dan adaptif, termasuk pendidikan dasar, menengah, keterampilan hidup, dan pemberdayaan ekonomi. Keberadaan PKBM sangat penting untuk menjembatani kesenjangan pendidikan, memberdayakan individu dengan keterampilan praktis, serta meningkatkan literasi dan numerasi di kalangan masyarakat yang sering terpinggirkan. Dengan demikian, PKBM menjadi sarana yang vital dalam mewujudkan tujuan pendidikan untuk semua dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Perkembangan internet dan teknologi digital di era revolusi industri 4.0 menempatkan teknologi sebagai basis dalam kehidupan manusia baik pada aspek pendidikan, ekonomi, politik, kebudayaan dan seni. Bidang pendidikan merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan memasuki era revolusi industri 5.0 khususnya terkait kualitas pendidikan (Zulkarnain, 2020). Pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan SDM yang terampil melalui konsep Merdeka Belajar. Penataan sistem pendidikan dibutuhkan secara menyeluruh khususnya terkait kualitas pendidikan dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dalam dunia kerja. Tujuan pendidikan

menurut UU No. 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut diharapkan semua anak yang masuk usia sekolah tidak putus sekolah atau ada alternative lain agar yang sudah putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan melalui paket A, B, dan C. Menurut Saepuloh dan Suherman (2019) penyebab putus sekolah yaitu: ekonomi masyarakat yang lemah, kurangnya usaha dari orang tua dalam membujuk anaknya untuk melanjutkan pendidikan, dan kurang meratanya pendataan dari pemerintah setempat dalam merespon program pendidikan sehingga masih banyak orang yang kurang mampu tidak mendapatkan program tersebut.

Selanjutnya menurut Teguh Triwiyanto (2020) penyebab utama putus sekolah yaitu krisis ekonomi yang membelit keluarga, mendorong anak tidak melanjutkan sekolah. Saat ini Indonesia mengalami pelemahan di bidang pertumbuhan ekonomi. Melemahnya pertumbuhan ekonomi, dapat diperkirakan angka putus sekolah pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan tahun 2020 dapat melebihi 33 % atau 14,9 juta dari 45,3 juta jumlah seluruh siswa Indonesia.

Permasalahan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga saat ini masih menjadi perhatian khusus dan membutuhkan solusi yang tepat dalam hal menangani rendahnya rata-rata lama sekolah, rendahnya harapan lama sekolah, rendahnya kompetensi serta sertifikasi pendidik secara tingkat nasional selama tiga tahun berturut turut.

Angka rata-rata lama sekolah dapat dijadikan acuan untuk memberikan gambaran terkait penyelenggaraan pendidikan dan indeks pembangunan

manusia di suatu daerah. Angka rata-rata sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani (BPS, 2021). Jumlah siswa putus sekolah dari tahun 2016/2017 hingga 2019/2020 diketahui tingkat SD sebanyak 1.267 siswa, SMP 1.428 siswa, SMA sebanyak 776 dan SMK sebanyak 1.677 siswa (<http://statistik.data.kemdikbud.go.id>).

Permasalahan lain yang ditemukan dalam bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tingginya angka putus sekolah siswa khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2019 – 2021 terdata sebanyak 2.348 siswa (Nona, 2021). Memang banyak faktor yang menyebabkan mereka putus sekolah. Menurut Bimby Gita Rama Putri et.al. (2020) berdasarkan hasil asesmen menunjukkan bahwa ketidakmampuan anak untuk melanjutkan sekolah bukan hanya karena factor ekonomi, tetapi juga karena factor mentalitas orang tua, rendahnya motivasi anak untuk belajar, pengaruh lingkungan pergaulan, dan juga kurangnya role model untuk mencapai cita-cita melalui jenjang pendidikan.

Ditinjau dari permasalahan tersebut maka ketercapaian wajib belajar di Bangka Belitung belum tercapai secara optimal. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 ayat 18 tentang wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016). Peraturan Pemerintah Nomor

19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 6 Ayat 3 menjelaskan suatu pendidikan nonformal dalam bentuk kursus atau lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan. Sehingga, masyarakat perlu memiliki keterampilan dan kecakapan hidup (*life skill*). Salah satu lembaga yang menyebabkan pendidikan kecakapan hidup yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 51 PKBM dan 5 Sanggar Kegiatan Belajar.

Upaya ini juga didukung oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka untuk menyelenggarakan dan menggalakkan pembentukan pendidikan nonformal, khususnya dalam bentuk PKBM di masing-masing kecamatan Kabupaten Bangka yang bertujuan memfasilitasi masyarakat yang putus sekolah dan masih berminat untuk belajar dapat mengikuti beberapa program PKBM (Edwardi, 2021). PKBM dan SKB yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan potensi bagi daerah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan yang terjadi serta program-program yang disusun di PKBM/SKB cenderung masih memiliki kesamaan dengan pendidikan formal. Permasalahan lain yang ditemukan pada pendidikan nonformal secara nasional seperti belum dikenal oleh masyarakat, belum profesional dan ketidakjelasan penyelenggaraan pendidikan nonformal ditinjau dari standar penjaminan mutu pendidikan nonformal (PKBM Bina Insan Kamil, 2016). Permasalahan lain terkait pendidikan nonformal adalah belum memperhatikan transformasi nilai dalam pelaksanaannya, sehingga menyebabkan program menjadi tidak efektif, program tidak memberikan dampak apapun terhadap warga belajar (Prasetyo, 2009), sumber belajar harus dipilih secara tepat agar dapat memberikan pengalaman dan kepentingan warga belajar (Hidayat, 2016). Pengelolaan pendidikan nonformal sangat

membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal dengan berbagai mitra kerja serta media massa yang ikut serta mempublikasikan sehingga pendidikan nonformal dapat dikenal lebih luas (Raharjo *et al.*, 2016).

Permasalahan belum tercapainya optimalisasi PKBM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu ditinjau dan dianalisis secara langsung di masing-masing kabupaten. Tujuannya adalah agar desain program yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan di kabupaten tersebut. Analisis kebutuhan ini merupakan tahapan awal dalam pengembangan sebuah program model sekolah kesetaraan. Permasalahan yang dijadikan sasaran untuk rancangan pengembangan dikhususkan pada tingginya permasalahan putus sekolah untuk usia 14 tahun ke atas. Manfaat hasil analisis kebutuhan pada jangka menengah adalah mengembangkan rancangan model sekolah kesetaraan untuk menekan angka siswa putus sekolah dan peningkatan rata-rata lama sekolah meningkat. Selain itu, dapat dijadikan media untuk mengembangkan diri melalui pengoptimalan Ipteks yang diintegrasikan potensi lokal Bangka Belitung melalui program-program unggulan yang telah didesain. Sehingga sasaran didik memiliki kecakapan hidup dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan.

Hasil analisis kebutuhan dapat dijadikan dasar untuk pengembangan desain bagi sekolah kesetaraan di Bangka Belitung. Sehingga rumusan masalahnya bagaimanakah penyelenggaraan PKBM/SKB program pendidikan kesetaraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang mencakup program paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Mendikbud, 2013).

Struktur kurikulum program paket A, B, dan C dilaksanakan dalam sistem tingkatan dan derajat yang setara dengan sistem kelas pada pendidikan formal, seperti program paket C yang meliputi tingkatan 5 dengan derajat kompetensi mahir 1 setara dengan kelas X SMA/MA dan tingkatan 6 dengan derajat kompetensi mahir 2 setara dengan kelas XII SMA/MA. Kurikulum program paket A, B, dan C memungkinkan peserta didik dari pendidikan informal dan formal pindah ke program paket A, B, dan C (Mendiknas, 2007).

Satuan Kredit Kompetensi (SKK) dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan informal, formal, kursus, keahlian, dan kegiatan mandiri. Satu SKK merupakan satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam tatap muka atau 2 jam tutorial, atau 3 jam mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. Satu jam tatap muka yang dimaksud merupakan satu jam pembelajaran yang setara dengan 35 menit untuk paket A, 40 menit untuk paket B, dan 45 menit untuk paket C. SKK merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran. SKK diperhitungkan untuk setiap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum. Satu SKK dihitung berdasarkan pertimbangan muatan standar kompetensi dan kompetensi dasar tiap mata pelajaran. Kemudian keseluruhan SKK untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) program paket A, B, dan C didistribusikan per semester.

Proses pembelajaran program paket A, B, dan C harus dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Standar proses program paket A, B, dan C mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran (Mendiknas, 2008).

Perencanaan proses pembelajaran program paket A, B, dan C memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik. Silabus sebagai acuan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran program paket A, B, dan C memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan nonformal penyelenggara program paket A, B, dan C berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum program paket A, B, dan C.

Pendidik program paket A, B, dan C terdiri atas tutor penanggung jawab kelas, tutor penanggung jawab mata pelajaran, dan nara sumber teknis. Program paket A, B, dan C sekurang-kurangnya terdiri dari pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan (Republik Indonesia, 2005).

Kualifikasi kompetensi-kompetensi manajerial pengelola program paket A, B, dan C meliputi memimpin, memotivasi, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta mengendalikan penyelenggaraan program paket A, B, dan C.

Kalender program paket A, B, dan C merupakan pengaturan kegiatan pembelajaran dalam satu ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, hari libur nasional, dan ujian nasional. Kalender pendidikan ini merupakan rambu-rambu bagi penyelenggara program paket A, B, dan C untuk mengatur kegiatan pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik (Mendiknas, 2007).

Program pendidikan kesetaraan dapat diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), majelis taklim, rumah pintar, dan lembaga bimbingan

belajar. Dengan demikian, PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat (Republik Indonesia, 2005). Pada penelitian ini akan di fokuskan pada bagaimana kebutuhan informasi awal rancangan model sekolah kesetaraan sebelum mengembangkan model sekolah kesetaraan dengan tujuan khusus yang diselenggarakan oleh PKBM.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif historiografi-fenomenologi. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis, merekonstruksi masa lampau secara naratif, benar, dan teliti dari beberapa sumber informasi dan melakukan analisis data sehingga menemukan bukti empiris yang representatif (Yusuf, 2014). Penelitian historiografi-fenomenologi digunakan untuk merekonstruksi kembali secara sistematis, akurat, dan objektif kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau dengan menggunakan pendekatan normatif dan interpretative (David, 2022). Penelitian ini melakukan penyelidikan, penilaian, menyintesis bukti untuk mendapatkan fakta dan mengambil kesimpulan yang tepat tentang objek yang diamati. Penelitian ini menggunakan sumber primer, sumber sekunder, dan catatan yang sedang berjalan sebagai cara untuk menemukan bukti-bukti historis.

Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data dan analisis secara naratif. Prosedur penelitian ini mencakup 4 tahapan: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sebelum memulai penelitian, pemilihan topik merupakan langkah awal dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan penelitian. 1) Tahapan heuristik, dalam penelitian ini adalah kegiatan menemukan, mengumpulkan berbagai sumber,

informasi, jejak masa lampau yang berkenaan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut diklasifikasi sebagai sumber primer dan sumber sekunder. 2) Verifikasi atau kritik sumber adalah menilai berbagai sumber baik primer maupun sekunder. Melalui tahapan ini, setiap data-data yang diperoleh diuji terlebih dahulu untuk memperoleh keabsahan sumber. Teknik pengujian keabsahan data penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Dalam penelitian kualitatif, data dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antarberbagai sumber. Uji kredibilitas penelitian ini yaitu meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan *member check*. 3) Interpretasi, merupakan kegiatan menafsirkan data-data yang diperoleh dari tahap verifikasi yaitu memahami dan mencari hubungan antar data empiris sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Setelah memperoleh data-data dari berbagai sumber, peneliti menyusun data tersebut yang disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian ini. Satu data dihubungkan dengan data lainnya atau merekonstruksi pokok-pokok permasalahan penelitian. 4) Historiografi, tahap ini merupakan tahapan terakhir dari penelitian yaitu memaparkan seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan.

Penelitian ini dilaksanakan di 7 kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu di 52 PKBM dan penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi. Sementara yang menjadi objek PKBM yang diteliti sebanyak 38 PKBM sehingga masing-masing wilayah untuk PKBM telah melebihi 50% dari jumlah populasi yang ada. Sedangkan sumber data penelitian yang digunakan meliputi sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, teknik observasi, teknik angket, dan teknik dokumen. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif

deskriptif dengan 3 tahapan yaitu data reduksi, penyajian data, dan verifikasi.

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil dan segera dilakukan analisis data tersebut. Sedangkan penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Terakhir penarikan simpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi awal rancangan model sekolah kesetaraan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di PKBM/SKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PKBM/SKB merupakan satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk masyarakat yang tidak terlayani kebutuhannya melalui pendidikan jalur formal. PKBM dibentuk oleh masyarakat sedangkan SKB dibentuk oleh pemerintah daerah di kabupaten/kota yang keduanya terbentuk atas dasar kebutuhan masyarakat secara global maupun

masyarakat setempat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki PKBM/SKB. Tercatat di laman Data Pokok Pendidikan PAUD Dikdasmen Kemdikbudristek tahun 2021, jumlah PKBM/SKB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 52 lembaga yang tersebar di setiap kabupaten/kota. Sebaran data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Sebaran PKBM/SKB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	PKBM	SKB
1.	Kota Pangkalpinang	6	1
2.	Kabupaten Bangka	10	1
3.	Kabupaten Bangka Tengah	8	0
4.	Kabupaten Bangka Barat	4	1
5.	Kabupaten Bangka Selatan	10	1
6.	Kabupaten Belitung	5	1
7.	Kabupaten Belitung Timur	4	0
Jumlah		47	5

Sumber: Data Pokok Pendidikan PAUD Dikdasmen Kemdikbudristek, 2021

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan merupakan kabupaten yang memiliki PKBM/SKB terbanyak yaitu 11 lembaga sedangkan Kabupaten Belitung Timur merupakan kabupaten yang memiliki PKBM/SKB terkecil sebanyak 4 lembaga. Seluruh PKBM/SKB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, keberadaan PKBM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah ada sejak tahun 1998 yaitu PKBM Taruna Maju di Kabupaten Belitung Timur meskipun secara legalitas izin operasionalnya tercatat

tahun 2001. Jika dilihat dari sejarah pembentukannya, PKBM tersebut berdiri sebelum terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau satu-satunya PKBM di Kabupaten Bangka Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1998. Setelah itu, hadir beberapa PKBM di berbagai kabupaten/kota sejak terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga tahun 2021.

Keberadaan lembaga nonformal yang secara kelembagaan diakui resmi oleh pemerintah sangat diharapkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengelola PKBM di 7 kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pembentukan PKBM khususnya program pendidikan kesetaraan didasari oleh berbagai faktor, *pertama*, keterbutuhan status sosial. Status sosial merupakan kedudukan sosial seseorang baik yang berada di lingkungan tertentu termasuk prestise, hak-hak, serta kewajibannya di dalam masyarakat. Kebutuhan masyarakat dengan adanya PKBM mampu meningkatkan status sosial yaitu taraf kehidupan dan dapat bersaing secara ekonomi dan pendidikan.

Kedua, tingginya angka putus sekolah. Angka putus sekolah beririsan dengan angka rata-rata lama sekolah (RLS). Angka putus sekolah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019—2021 sebanyak 2.348 (Nona, 2021). Berdasarkan data BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, angka RLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 7,98. Angka tersebut mengartikan bahwa masyarakat Bangka Belitung yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,98 tahun atau hampir menamatkan pendidikan di kelas VIII. Pada tahun 2020, angka RLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat menjadi 8,06 tahun.

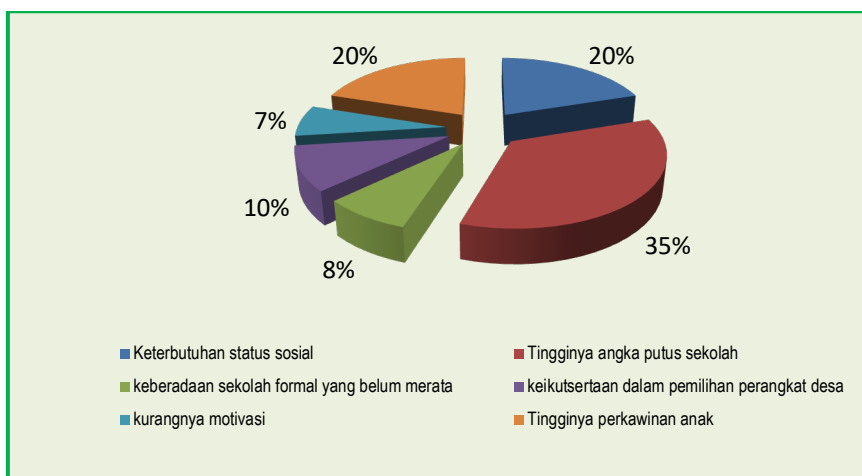
Ketiga, fasilitas pendidikan khususnya jenjang pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata. Keberadaan sekolah di setiap desa

maupun kecamatan wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya SMA/SMK masih terbatas menyebabkan sulitnya anak-anak untuk mengakses layanan pendidikan, termasuk juga fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus masih sangat minim. Jarak yang harus ditempuh anak-anak dari rumah ke sekolah minimal 30 km.

Keempat, keinginan masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan perangkat desa. Kesempatan masyarakat setempat untuk bekerja di pemerintahan desa sangat besar. Salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan perangkat desa adalah berpendidikan minimal SMA. *Kelima*, kurangnya motivasi. Kurangnya motivasi menjadi salah satu faktor yang relevan penyebab tinggi angka putus sekolah. Substansinya adalah lebih mengedepankan kepentingan untuk keluarga dan dirinya sendiri yang dapat menghasilkan uang daripada bersekolah. *Keenam*, tingginya angka perkawinan anak. Menikah muda

adalah solusi bagi anak-anak yang putus sekolah. Anak yang menganggur atau bekerja membantu orangtuanya menyebabkan menikah adalah pilihan (Yuniar, 2021). Berdasarkan data BPS Indonesia tahun 2020, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menduduki peringkat pertama angka perkawinan anak sebesar 18,76% dari 34 provinsi se-Indonesia. Kabupaten Bangka Barat merupakan kabupaten tertinggi angka perkawinan anak sebanyak 312 anak disusul Kabupaten Belitung Timur sebanyak 215 anak, dan Kabupaten Bangka sebanyak 191 anak (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021).

Persentase faktor-faktor terbentuknya program pendidikan kesetaraan di PKBM se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Persentase Faktor-faktor Terbentuknya Program Pendidikan Kesetaraan di PKBM se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: data diolah, 2021

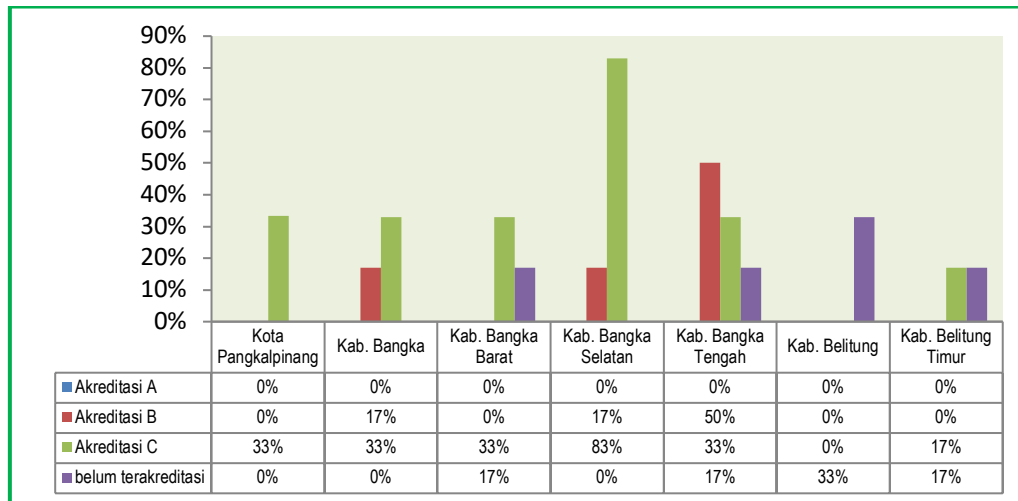
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan PKBM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada program pendidikan kesetaraan bertujuan untuk: 1) meningkatkan pendidikan masyarakat; 2) memberikan pendidikan keterampilan hidup kepada masyarakat; dan 3)

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Penyelenggaraan PKBM ditentukan oleh budaya mutu yang diukur melalui akreditasi. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi terhadap 38 PKBM, mayoritas PKBM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terakreditasi C. PKBM

yang belum terakreditasi juga menjadi perhatian guna meningkatkan kualitas pendidikan nonformal, meskipun sebagian PKBM sudah terakreditasi B. Berdasarkan hasil wawancara kepada para pengelola PKBM, permasalahan utama PKBM yang belum terakreditasi adalah pengetahuan

para pengelola tentang penilaian mutu PKBM masih minim. Selain itu, tenaga administrasi yang membantu persiapan akreditasi juga sangat minim. Akreditasi PKBM se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan data dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Akreditasi PKBM se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: data diolah, 2021

Penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan di PKBM se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan 1 hingga 3 kali pertemuan perminggu. Setiap pertemuan rata-rata selama 2—4 jam pelajaran. Sejak terbentuknya PKBM di masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga saat ini, penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan dilaksanakan di sekolah-sekolah formal atas kerja sama pengelola PKBM dan kepala sekolah, fasilitas desa, gedung milik PKBM. Sejak hadirnya Pandemi Covid-19, bentuk penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan yang diterapkan adalah metode *blended learning* atau 50% daring dan 50% tatap muka.

Lebih lanjut, berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan, model pembelajaran program pendidikan kesetaraan yang digunakan di PKBM adalah model pembelajaran berbasis kewirausahaan. Model pembelajaran berbasis kewirausahaan bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang

kewirausahaan, menanamkan pola pikir wirausaha kepada warga belajar, dan melatih keterampilan berwirausaha. Selain itu, model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran mandiri. Model pembelajaran mandiri tidak memusatkan tempat pelaksanaan pembelajaran, akan tetapi berpindah-pindah agar warga belajar merasa nyaman. Implementasi model pembelajaran tersebut, disertai penggunaan metode pembelajaran penugasan dan tutorial. Metode penugasan digunakan agar warga belajar dapat mempraktikkan secara langsung berdasarkan teori yang telah dipelajari. Kedua model pembelajaran tersebut digunakan bersifat sementara, dilakukan hanya saat-saat tertentu saja.

Salah satu keberhasilan penyelenggaraan PKBM adalah ketersediaan dan mutu SDM baik tutor maupun tenaga administrasi. Tutor program Pendidikan Kesetaraan PKBM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan tenaga pendidik di sekolah formal mulai dari guru SD hingga SMA. Berdasarkan

hasil observasi di 38 PKBM, jumlah tutor PKBM se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel 2.

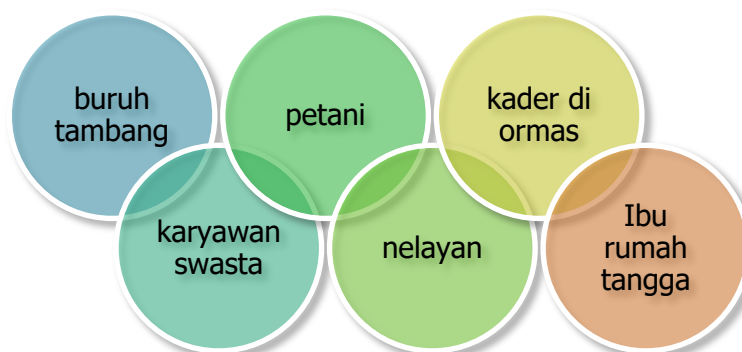
Tabel 2. Jumlah Tutor di PKBM se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah tutor
1.	Kota Pangkalpinang	33
2.	Kabupaten Bangka	34
3.	Kabupaten Bangka Tengah	71
4.	Kabupaten Bangka Barat	33
5.	Kabupaten Bangka Selatan	100
6.	Kabupaten Belitung	35
7.	Kabupaten Belitung Timur	28

Sumber: data diolah, 2021

Selain tutor, warga belajar merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan PKBM. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan, warga belajar program Pendidikan Kesetaraan di PKBM se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan masyarakat putus sekolah dan masyarakat usia sekolah yang tidak bersekolah. Warga belajar program Pendidikan Kesetaraan di PKBM se-

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusia 7—73 tahun. Karakteristik warga belajar tersebut didominasi oleh masyarakat berusia 19—30 tahun. Latar belakang pekerjaan warga belajar tersebut beraneka ragam. Sebaran latar belakang pekerjaan warga belajar program Pendidikan Kesetaraan di PKBM se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar 3.

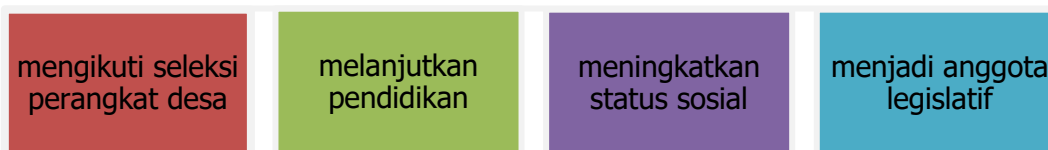


Gambar 3. Sebaran Warga Belajar Program Pendidikan Kesetaraan di PKBM se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan

Sumber: data diolah, 2021

Warga belajar program Pendidikan Kesetaraan di PKBM se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termotivasi oleh berbagai faktor, yaitu mengikuti seleksi perangkat desa, melanjutkan pendidikan agar dapat sampai ke jenjang

perguruan tinggi, meningkatkan status sosial, menjadi anggota legislatif. Sebaran latar belakang masyarakat melanjutkan program pendidikan kesetaraan di PKBM se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Latar Belakang Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melanjutkan Program Pendidikan Kesetaraan di PKBM

Sumber: data diolah, 2021

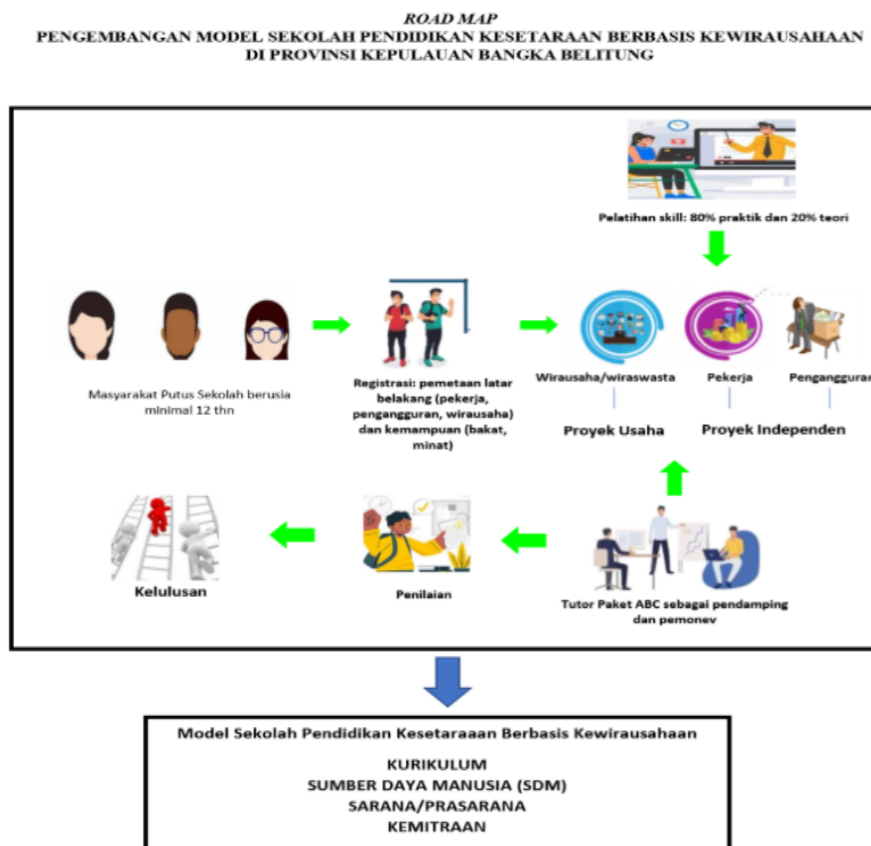
Berdasarkan hasil telaah tersebut, penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di PKBM se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum ditemukan adanya inovasi baik pengelolaan maupun pelaksanaan pembelajaran, ketersediaan tutor yang sangat minim dan terbatas, latar belakang warga belajar mayoritas adalah pekerja sehingga pengaturan waktu warga belajar antara bekerja dengan belajar belum optimal. Dengan demikian, PKBM sebagai lembaga pendidikan yang memiliki hak pengelolaan pendidikan nonformal bagi masyarakat yang tidak mampu mengenyam pendidikan di sekolah formal, harus mampu memfasilitasi masyarakat untuk tetap melanjutkan pendidikan dengan mengembangkan konsep:

1. Dapat belajar kapan dan di mana saja.
- 2.
3. Menjadikan pekerjaan warga belajar sebagai nilai. Warga belajar yang telah

bekerja misalnya sebagai buruh tambang timah, pekerjaannya diakui dan dikonversikan sehingga mendapatkan nilai di program pendidikan kesetaraan.

4. Memberikan kursus atau pelatihan bagi warga belajar putus sekolah yang belum bekerja. Warga belajar yang belum bekerja diberikan pelatihan sehingga menghasilkan keterampilan yang mampu menciptakan sebuah produk dan menciptakan karakter mandiri. Untuk menciptakan berbagai pelatihan, PKBM dapat bekerja sama dengan berbagai industri, Balai Latihan dan Diklat, BUMD, dan BUMN.

Ketiga konsep tersebut memiliki indikator yang mampu menghasilkan lulusan berpikir kritis dan mengatasi masalah, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik, serta kreatif dan inovatif seperti pada desain model sekolah kesetaraan berikut ini.



Gambar 5. Desain Model Sekolah Pendidikan Kesetaraan Berbasis Kewirausahaan

Gambar 5 di atas merupakan gagasan model pendidikan kesetaraan berbasis yang akan ditawarkan dan dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Berdasarkan *road map* pada gambar 5 di atas maka langkah-langkah yang harus dikembangkan adalah:

1. Adanya masyarakat putus sekolah yang berusia minimal 12 tahun.
2. Melakukan registrasi pemetaan latar belakang yang meliputi latar belakang pekerjaan, pengangguran, wirausaha serta kemampuan seperti bakat dan minat calon peserta didik.
3. Berdasarkan pemetaan latar belakang jika ditemui adanya wirausaha/wiraswasta maka akan diarahkan ke proyek usaha, jika calon peserta didik sudah bekerja atau pengangguran maka diusahakan kearah proyek independen atau proyek

mandiri. Selain itu, dilakukan juga melalui berbagai pelatihan skill yang mengarah ke 80% praktik dan 20% teori.

4. Tutor paket A,B, dan C sebagai pendamping dan pemonev dari apa yang dilaksanakan oleh peserta didik ketika melaksanakan pada langkah ketiga di atas yang disertai dengan pembelajaran paket masing-masing.
5. Tutor melakukan penilaian baik penilaian yang didasarkan saat pembelajaran maupun saat penilaian ketika melaksanakan berbagai usaha dan pelatihan peserta didik.
6. Peserta paket dinyatakan lulus setelah melalui prose pendidikan yang dilakukan oleh PKBM/SKB yang dilaksanakan sesuai aturan lembaga terkait. Selain itu, pihak peserta didik

juga memperoleh pengetahuan tambahan berdasarkan usaha yang dilakukan.

Langkah-langkah tersebut memberikan gambaran bahwa model ini memberikan alternatif setelah mengikuti pembelajaran pendidikan kesetaraan sehingga tidak hanya sekedar menyelesaikan pendidikan tetapi ada keterampilan tambahan yang menjadi bekal peserta didik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi awal rancangan model sekolah kesetaraan sebelum mengembangkan model sekolah kesetaraan tersebut. Tujuan khusus penelitian ini untuk mengetahui penyelenggaraan PKBM/SKB program pendidikan kesetaraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat disimpulkan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di PKBM se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan dilaksanakan di semua PKBM se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri atas Paket A, Paket B, dan Paket C. Penyelenggaraan program tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat, yaitu: keterbutuhan status sosial, tingginya angka putus sekolah, fasilitas pendidikan khususnya jenjang pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata, keinginan masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan perangkat desa, kurangnya motivasi, dan tingginya angka perkawinan anak.

Berdasarkan hasil telaah tersebut, penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di PKBM se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum ditemukan adanya inovasi baik pengelolaan maupun pelaksanaan pembelajaran,

ketersediaan tutor yang sangat minim dan terbatas, latar belakang warga belajar mayoritas adalah pekerja sehingga pengaturan waktu warga belajar antara bekerja dengan belajar belum optimal. Dengan demikian, berlandaskan rencana pembangunan pemerintah pusat dan daerah serta berbagai referensi relevan yang telah ditelaah, PKBM sebagai lembaga pendidikan yang memiliki hak pengelolaan pendidikan nonformal bagi masyarakat yang tidak mampu mengenyam pendidikan di sekolah formal, harus mampu memfasilitasi masyarakat untuk tetap melanjutkan pendidikan dengan mengembangkan konsep: dapat belajar kapan dan di mana saja; menjadikan pekerjaan warga belajar sebagai nilai, memberikan kursus atau pelatihan bagi warga belajar putus sekolah yang belum bekerja. Untuk menciptakan berbagai pelatihan, PKBM dapat bekerja sama dengan berbagai industri, Balai Latihan dan Diklat, BUMD, dan BUMN. Ketiga konsep tersebut memiliki indikator yang mampu menghasilkan lulusan berpikir kritis dan mengatasi masalah, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik, serta kreatif dan inovatif.

Saran

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan melalui penelitian ini, beberapa hal yang menjadi catatan untuk direkomendasi kepada:

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan memiliki *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK). GDPK adalah rumusan perencanaan pembangunan kependudukan untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dan dijabarkan setiap lima tahunan. Tujuan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi melalui lima

- pilar, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan ruang dan pengaturan kependudukan, serta pembangunan administrasi kependudukan. kelima aspek GDPK tersebut berkaitan erat kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
 - a. Data menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta pengambilan keputusan kebijakan. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) khusus data PKBM, SKB dan penyelenggara pendidikan nonformal lainnya tidak sesuai dengan data yang tercatat di masing-masing lembaga penyelenggara PKBM. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menginstruksikan kepada di masing-masing penyelenggara PKBM/SKB agar dapat diperbaharui sesuai dengan data yang dimiliki lembaga.
 - b. PKBM merupakan lembaga nonformal yang dapat diselenggarakan di mana saja. Meskipun demikian, perlu adanya ruang kelas nonformal bagi program kesetaraan. Oleh karena itu, Pemerintah daerah Kabupaten/kota diharapkan dapat memfasilitasi sarana dan prasarana bagi lembaga PKBM. Selain sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan

- karier pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan kesetaraan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.
- c. Memfasilitasi kerja sama antara PKBM dengan berbagai pihak, seperti industri, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dan mitra lainnya.
3. Lembaga PKBM (Penyelenggara program pendidikan kesetaraan)
Lembaga PKBM merupakan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan nonformal yang bertujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk itu diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti: satuan pendidikan formal, perguruan tinggi, usaha milik perseorangan, BUMD, dan BUMN.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian pengembangan ini dilaksanakan atas kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Ucapan terima kasih atas upaya Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah mensponsori penelitian pengembangan ini dan semoga berlanjut pada penelitian berikutnya terutama pada penerapan Model Sekolah Pendidikan Kesetaraan Berbasis Kewirausahaan di PKBM.

PUSTAKA ACUAN

Ahmad Zulkarnain. (2020). Tantangan Pendidikan untuk Kewirausahaan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Menuju Era Society 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 0, 293–306.

Bimby Gita Rama Putri, Maulana Irfan, Meilanny Budiarti Santoso. (2020). Upaya Peningkatan Kesadaran Pentingnya Melanjutkan Pendidikan Terhadap Anak dan Remaja putus sekolah di RT 04/RW 05 Kelurahan Kebon Kangkung Kota Bandung. *Jurnal Pekerja Sosial* Vol. 3 No. 2, 140-157.

- BPS. (2021). *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka*. Pangkalpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- David M. Dean. (2022). "Historical Research: A Guide to Resources and Methodology" oleh Journal of Historical Methodology, vol. 56, no. 2, 2022, pp. 102-121.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2021). *Upaya Pencegahan Perkawinan Anak dan Stunting di Bangka Belitung*.
- Edwardi. (2021). Atasi Anak Putus Sekolah, Pemkab Bangka Dorong Pendidikan Nonformal, 2 Kecamatan Belum Miliki PKPM. *BangkaPos*. <https://bangka.tribunnews.com/2021/05/20/atasi-anak-putus-sekolah-pemkab-bangka-dorong-pendidikan-non-formal-2-kecamatan-belum-miliki-pkpm>
- Hidayat, D. (2016). Strategi Pembelajaran Partisipatif dalam Meningkatkan Hasil Program Pendidikan Nonformal di Kabupaten Karawang. *Journal of Nonformal Education*, 2(1).
- <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/index.php/page/sd>. (n.d.). Jumlah Siswa Putus Sekolah menurut Tingkat tiap Provinsi. In <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/index.php/page/sd>.
- Mendikbud. (2013). *Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal*. Jakarta : Mendikbud.
- Mendiknas. (2007). *Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C*. Jakarta : Mendiknas.
- Mendiknas. (2008). *Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C*. Jakarta : Mendiknas.
- Nona. (2021). Pemprov Babel Siap Selamatkan Generasi Muda Babel Putus Sekolah dan Menikah Dini. *Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. <https://babelprov.go.id/content/pemprov-babel-siap-selamatkan-generasi-muda-babel-putus-sekolah-dan-menikah-dini>
- Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016. *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/11656/perda-prov-bangka-belitung-no-4-tahun-2016>.
- PKBM Bina Insan Kamil. (2016). *Apakah Masalah dan Tantangan Pendidikan Nonformal?* PKBM Bina Insan Kamil. <https://pkbmbinainsankamil.sch.id/apakah-masalah-dan-tantangan-pendidikan-non-formal/>
- Prasetyo, I. (2009). Membangun Karakter Wirausaha melalui Pendidikan Berbasis Nilai dalam Program Pendidikan Nonformal. *Jurnal PNFI*, 1(1), 1–12.
- Raharjo, T. J., Suminar, T., & Mu'arifuddin. (2016). Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam Menanggulangi Kemiskinan melalui Pendidikan Nonformal di Jawa Tengah. *Journal of Nonformal Education*, 2 (1).
- Republik Indonesia. (2005). *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Republik Indonesia

Saepuloh, D., dan Suherman, A. (2019). Analisis Penyebab Angka Putus Sekolah dan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga di Kota Tenggerang. *Pelita: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 18(2), 98-111. <https://doi.org/10.33592/pelita.v18i2.45>

Triwiyanto, Teguh. (2020). Bukan Sekedar Subsidi Pulsa, untuk Mengurangi Angka Putus Sekolah Dampak Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Arah Manajemen Sekolah pada Masa dan Pasca Pandemi Covid-19*. <http://conference.um.id>.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Yuniar, D. P. (2021). Faktor Penyebab Putus Sekolah pada Anak di Wilayah Pedesaan (Studi Kasus di Desa Sonowangi Kabupaten Malang). *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 99-107.

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenadamedia Group.